

PRINSIP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMK NEGERI 5 SAMARINDA

Susanti¹

Abstrak

Susanti, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 5 Samarinda. Di bawah bimbingan Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. H. Hamdan, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan prinsip pengelolaan dana bantuan operasional (BOS) di SMK Negeri 5 Samarinda. Selain itu juga untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam prinsip pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMK Negeri 5 Samarinda.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan atau obyek penelitian pada masa sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif juga bertujuan untuk memberikan uraian tentang suatu masyarakat atau sekelompok orang tertentu atau gambaran tentang gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Kesimpulan dari hasil penelitian diperoleh penulis dan menunjukkan bahwa implementasi dalam prinsip program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan sekolah telah memenuhi standar meskipun belum dikatakan efisien dan berkualitas serta memadai. Selain itu terdapat pula hambatan-hambatan yang mempengaruhi seperti adanya ketidaktepatannya waktu dalam pelaporan keuangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), perubahan perencanaan awal dalam penggunaan dana dalam program dana BOS untuk membeli barang sesuai dengan petunjuk teknis dalam pembelian barang seperti alat tulis kantor dan barang praktik, dan adanya perbedaan persepsi antara komite sekolah dan panitia khusus dalam program dana BOS di SMK Negeri 5 Samarinda.

Kata Kunci : Prinsip dana BOS SMK, Faktor Penghambat Dana BOS SMK

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar

¹ Mahasiswa Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Susanti. Email : ssusanti26@yahoo.com

tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Program BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar dua belas tahun. Program BOS sangat berperan untuk mempertahankan angka ke ikut sertaan bersekolah, yang di lihat melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), di samping itu juga harus berkontribusi penting dalam peningkatan mutu pendidikan dasar, serta tuntutan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.

Dalam prinsip penyelenggaraannya Dana BOS SMK memiliki beberapa prinsip pelaksanaan yang harus di taati oleh penerima dana tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di SMK Negeri 5 Samarinda dapat dikatakan masih jauh dari apa yang di amanatkan dalam Petunjuk Teknis BOS SMK 2014 yang mana dalam petunjuk tersebut dikatakan bahwa dalam pengelolaan program BOS SMK mengacu pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah dalam pengelolaannya harus dilaksanakan Swakelola dan Partisipatif, Transparan, Akuntabel, Demokratis, Efektif dan Efisien, Tertib Administrasi dan Pelaporan, dan saling percaya dalam penyelenggaraannya.

Adapun permasalahan yang penulis peroleh dalam observasi yang dilakukan di SMK Negeri 5 Samarinda mengenai penyelenggaraan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan keterangan dari beberapa guru yang penulis temui diperoleh keterangan bahwa masih adanya biaya buku untuk proses pembelajaran di sekolah kepada tiap masing-masing siswa, adanya biaya kebersihan setiap minggu dan pembayaran untuk pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), serta adanya pembayaran ujian praktek yang dibebankan kepada siswanya. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan besar bagi banyak pihak baik dewan guru, para orang tua siswa dan masyarakat sekolah akan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut.

Dengan adanya berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengambil judul penelitian sebagai berikut “ Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Negeri 5 Samarinda ”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Negeri 5 Samarinda ?
2. Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Negeri 5 Samarinda ?

Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta mengawasi dan memberi saran serta kritik kepada SMK Negeri 5 di Samarinda.
2. Sebagai referensi bagi pemerintah dalam pelaksanaan dana BOS SMK di setiap sekolah.
3. Mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut tentang kebijakan publik.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Teori Implementasi

Menurut Guntur (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Pengertian Kebijakan

Menurut Friedrich dalam Wahab (2002:3) mengatakan bahwa Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik menurut kamus *Webster* dalam Wahab (2002:64) diartikan “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).” Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat sesuatu tertentu.

Selanjutnya *Mazmanian* dan *Sabatier* dalam Wahab (2002:68-69) Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (intansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata dari output tersebut, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.

Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. *Meter* dan *Horn* dalam Nugroho (2003:195) mengajukan enam faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik, diantaranya adalah :

1. Standar dan tujuan kebijakan

Setiap kebijakan publik standar dan tujuan harus senantiasa dicantumkan dengan jelas.

2. Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya merupakan aspek penting dalam menunjang implementasi kebijakan.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Kebijakan

Sebagai mana disebutkan diatas, bahwa setiap tujuan kebijakan harus mempunyai standard dan tujuan yang jelas.

4. Karakteristik Badan/ Intansi Pelaksana Kebijakan

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementor) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif, karena adanya suatu karakteristik dari badan/intansi pelaksana kebijakan.

5. Sikap Pelaksana Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan tentu tidak lepas dari sikap pelaksana.

6. Kondisi Sosial Ekonomi dan politik

Kondisi yang bersangkutan dalam suatu negara seperti gejolak sosial, ekonomi politik secara tidak langsung turut berpengaruh terhadap dibuatnya suatu kebijakan baru.

Pengertian Pendidikan

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa.

Soekidjo Notoatmodjo (2003 : 16) Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Petunjuk Teknis BOS SMK (2014:2) BOS SMK adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SMK baik Negeri maupun Swasta untuk membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia. Besar dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan satuan biaya (*unit cost*) bantuan

Definisi Konsepsional

Untuk memudahkan pengukuran suatu konsep perlu penulis gambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial yang berkenaan dengan judul skripsi ini. Dimana definisi konsepsional ini merupakan konsep untuk membatasi pengertian tentang suatu hal. Hal ini sesuai dengan pendapat Tan dalam Koentjarningrat (2001:32) bahwa konsep atau pengertian unsur pokok dari suatu penelitian. Kalau masalahnya dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula faktor mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat sekelompok fakta atau gejala itu”.

Hasil upaya yang telah dilakukan oleh kepala sekolah, para guru dan staff guna menjalankan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 5 Samarinda adalah dengan mengikuti aturan-aturan prinsip yang tercantum dalam petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang meliputi swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, dan efektif dan efisien serta tertib administrasi dan pelaporan , sehingga diharapkan dapat memberikan kinerja organisasi yang terbaik dan maksimal kepada siswa dan siswi serta orang tua di SMK Negeri 5 Samarinda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan tujuan pengujian masalah penelitian mengenai deskriptif atau penggambaran ataupun menuliskan tentang Penghambat Dalam Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Negeri 5 Samarinda, maka yang akan di kaji atau dijadikan fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Variabel Implementasi adalah :
 - a. Swakelola dan Partisipatif
 - b. Transparan
 - c. Akuntabel
 - d. Demokratis
 - e. Efektif dan Efisien
 - f. Tertib Administrasi dan Pelaporan
2. Faktor Penghambat Dalam Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Negeri 5 Samarinda.
- 3.

Sumber dan Jenis Data

Menurut Sugiyono (2013:53) dalam penentuan pemilihan informan dapat menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah menentukan subjek/objek sesuai tujuan, teknik sampling ini digunakan dengan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis yang berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif. Sehingga dalam penelitian ini *key informan* dan *informan* ditentukan melalui teknik *Purposive Sampling*.

Menurut Pabundu (2006:57-58) sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti. Adapun sumber data yakni *Key informan* adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Samarinda, dan yang menjadi *Informan* adalah Guru-guru SMK Negeri 5 Samarinda.
2. Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Penulis peroleh melalui sumber informan, yakni :
 - a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip,dan laporan-laporan.
 - b. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

Ada tiga proses kegiatan yang di lakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data Moleong (2004:168). Adapun proses yang di maksud, yaitu :

a. Proses Memasuki Lokasi penelitian (*Getting In*)

Dalam tahap ini peneliti memasuki lokasi dengan membawa izin penelitian dan menemui pimpinan tempat dilakukan penelitian, selanjutnya peneliti mengungkapkan maksud dan tujuan sekaligus meminta izin untuk melakukan penelitian. Peneliti juga melakukan interaksi terhadap pegawainya untuk membina hubungan baik sehingga dapat mengurangi jarak sosial antara peneliti dan sumber data.

b. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (*Getting Along*)

Dimana dalam tahap ini peneliti menjalin hubungan pribadi dalam subjek penelitian. Peneliti mencari informasi yang dibutuhkan, mengadakan pengamatan dan menangkap makna dari fenomena yang ditelusuri. Kemudian informasi yang di dapatkan oleh peneliti, diolah dan ditafsirkan setelah itu di analisis. Dengan demikian informasi selengkap-lengkapnya dapat di peroleh sesuai dengan fokus penelitian.

c. Mengumpulkan data (*Logging The Data*)

Untuk mendapatkan data-data yang di perlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi (pengamatan).
2. Interview (Wawancara).
3. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan dengan metode analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sarori dan Komariah (2010:39) yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Samarinda

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Samarinda terletak di Jalan M. Yamin No. 75 Sempaja berdiri pada tahun 1982 merupakan sekolah swasta yang bernama Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) satu-satunya sekolah yang ada di provinsi Kalimantan Timur dan pada tahun 1991 statusnya berubah dari swasta menjadi negeri, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02.16/0/1992, tanggal 15 Mei 1992 terhitung tanggal 1 April 1992, selanjutnya sesuai dengan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka sejak tahun 1997/1998 sekolah ini berubah namanya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Samarinda

Dari data yang dapat dihimpun para pemimpin SMK Negeri 5 Samarinda sejak jaman penjajahan hingga sekarang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Identitas pimpinan Sekolah Menengah Kejuruan 5 Samarinda

NO	NAMA PEMIMPIN	TAHUN KEPEMIMPINAN
1	Drs. Sudiono Ngadimun, MM	1982-2002
2	Abdul Salam Manan, SE. MM	2002-2006
3	Drs. Sucipto, MM	2006-2012
4	Drs. Muhajiyanto, M.Pd	2013- 2015
5	Muhammad Fahrur Roji, S.PD.,M.Ed.	2015-hingga sekarang

Sumber : Profil SMK Negeri 5 Samarinda (2015)

Visi

“Unggul Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Tingkat Menengah Yang Mandiri, Kompeten, Beriptek, dan Berimtaq”

Misi

1. Optimalisasi proses belajar mengajar dan kegiatan belajar-mengajar.
2. Mencetak tamatan yang berjiwa Interpreneur.
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya sekolah.
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan guru dan pegawai.
5. Menghasilkan tamatan yang mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris, mengoperasikan komputer dan internet.
6. Mengasumsikan SMK Negeri 5 Samarinda sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan (PPKT), *Community Collage (CC)* dan *Crisis Center*.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai Prinsip pengelolaan dana BOS SMK Negeri 5 Samarinda. Berbicara tentang prinsip dana BOS sebagaimana yang dikemukakan di atas sangat menarik dan perlu mendapat perhatian yang lebih, karena dampak yang terjadi dari program dan BOS berpengaruh terhadap kesejahteraan murid-murid serta orang tua.

1. Swakelola dan Partisipatif

Prinsip swakelola merupakan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh instansi pemerintah penanggung jawab anggaran. Instansi pemerintah lainnya atau oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan prinsip partisipatif adalah melibatkan warga sekolah dan masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini untuk prinsip swakelola dan partisipatif di SMK Negeri 5 Samarinda dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK sudah dilakukan dengan baik karena pihak sekolah telah memberikan masing-masing tugas kepada warga sekolah untuk melaksanakan program penggunaan dana BOS dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku seperti staff penanggung jawab alat tulis kantor dan staff penanggung jawab pengadaan barang praktik. Selain baik dalam pembagian tugas dalam program dana Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS), pihak sekolah juga telah melibatkan warga sekolah untuk aktif berpartisipasi dalam mendukung terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk partrisipatif yang dilaksanakan oleh pihak sekolah adalah dengan mengadakan rapat dewan guru yang juga melibatkan warga sekolah dan wakil orang tua siswa mengenai program sekolah dalam satu tahun ke depan.

2. *Transparan*

Bahwa pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.

Dari penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip transparan dalam program pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Negeri 5 Samarinda belum berjalan dengan baik karena pelaksanaan sosialisasi program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada orang tua siswa hanya sebagian besarnya saja. Kebijakan pengelolaan program dan penggunaan dana belum diinformasikan secara keseluruhan. Untuk tempat pengaduan dan penanganan masalah pengaduan belum memadai, sehingga warga sekolah kesulitan untuk menyampaikan permasalahan jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

3. *Akuntabel*

Menekankan bahwa pengelolaan dana harus dipertanggungjawabkan, sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang sudah disepakati.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini dalam prinsip akuntabel belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya keterlibatan antara seluruh staff guru dan warga sekolah, sekolah belum melakukan taksiran harga dengan cermat dan kurangnya sekolah dalam memaksimalkan peran komite sekolah.

4. *Demokratis*

Menekankan bahwa penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di tempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini dalam prinsip demokratis sudah berjalan dengan baik dalam pembentukan tim untuk pengalokasian anggaran dalam dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS SMK tetapi ada kekurangan dalam pembentukan yaitu tidak semua staff guru diikutsertakan dalam pertanggungjawaban dalam suatu kegiatan dan tidak adanya keterbukaan kepada wali murid dalam seluruh informasi dana BOS yang dilaksanakan sehingga belum ada orang tua siswa yang memberikan saran, kritik dan pendapat terkait pelaksanaan dana BOS SMK.

5. Efektif dan Efisien

Menekankan bahwa pemanfaatan dana harus efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini dalam prinsip efektif dan efisien belum berjalan dengan baik dikarenakan belum matangnya perencanaan awal dalam penggunaan dana BOS sehingga terjadi perubahan jumlah anggaran dalam penggunaan dana BOS dikarenakan belum sesuai dengan petunjuk teknis BOS yang telah ditentukan dan adanya keterlambatan atau tidak tepat waktu dalam pelaporan penggunaan anggaran dana BOS.

6. Tertib Administrasi dan Pelaporan

Menekankan bahwa sekolah menerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini dalam prinsip tertib administrasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya keterlambatan pelaporan anggaran dana BOS tetapi untuk sistem laporan dalam penanggung jawaban dana BOS sudah dilaksanakan dengan baik karena staff keuangan telah membuat Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RKAS) maupun rincian penggunaan BOS dengan membuat pembukuan baik secara administratif maupun pelaporan meliputi buku kas umum, buku kas pembantu bank, bukti pengeluaran dana BOS, laporan ringkas dan lain-lain.

7. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional (BOS) di SMK Negeri 5 Samarinda

Faktor penghambat pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 5 Samarinda adalah mengenai pelaporan yang kurang efektif, penyampaian kepada warga sekolah dan wali murid yang hanya sebagian besarnya saja, sarana dan prasarana yang belum lengkap dalam penampungan saran, kritik untuk wali murid dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 5 Samarinda disebabkan karena adanya ketidak tepatannya waktu dalam pelaporan keuangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), perubahan perencanaan awal dalam penggunaan dana dalam program dana BOS untuk membeli barang sesuai dengan petunjuk teknis dalam pembelian barang seperti alat tulis kantor dan barang praktik, dan adanya terjadi perbedaan persepsi antara komite sekolah dan panitia khusus dalam program dana BOS.

Pembahasan

Program Dalam Prinsip Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Negeri 5 Samarinda

1. Swakelola dan Partisipatif

Swakelola dan partisipatif merupakan prinsip program yang dilakukan atau dikerjakan secara terencana dan di awasi sendiri. Swakelola dan partisipatif bertujuan untuk mempermudah perencanaan yang telah direncanakan karena semua warga sekolah dan masyarakat berpartisipasi secara aktif terhadap dukungan dalam program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan mengetahui swakelola dan partisipatif yang mematuhi peraturan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa swakelola dan

pertisipatif di SMK Negeri 5 sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik dalam faktor sumber daya kebijakan dimana aspek penting dalam menunjang implementasi kebijakan tersebut jelas dan konsistensinya dalam ketentuan-ketentuan dan pertauran swakelola dan partisipatif dapat dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat mengerti dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam program yang diberikan di SMK Negeri 5 Samarinda.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Samarinda merupakan salah satu sekolah yang berkewajiban melaksanakan program dana BOS SMK secara swakelola dan partisipatif dengan baik. Oleh karena itu, SMK Negeri 5 Samarinda harus benar-benar melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sesuai peraturan yang berlaku yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam setiap pelaksanaan program dana BOS SMK.

2. *Transparan*

SMK Negeri 5 Samarinda merupakan sekolah yang memberikan program dana BOS untuk diberikan kepada siswa-siswa yang telah memenuhi syarat sesuai juknis dana BOS.

Siswa-siswa sebagai penerima program dana BOS tentunya mengharapkan pedanaan yang mereka terima tidak berbelit-belit dan terbuka dalam pendanaannya sehingga selaku orang tua mengerti dan paham serta dapat memberikan kritik dan saran dalam pelaksanaan program dana BOS tersebut. Sesuai dalam teori implementasi kebijakan publik dalam faktor standar dan tujuan kebijakan dimana kebijakan senantiasa dicantumkan dengan jelas akan mudah dalam pemakaiannya oleh para pelaksana kebijakan sehingga masyarakat sebagai objek dari pemberlakuan kebijakan tersebut mengetahui secara jelas tujuan yang dicapai dalam suatu kebijakan yang diterapkan dalam dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)..

3. *Akuntabel*

Prinsip akuntabel menekankan dalam teori impementasi kebijakan publik dimana faktor karateristik badan/instansi pelaksana kebijakan karena karateristik memperlihatkan bagaimana suatu organisasi di dalamnya terdapat individu-individu yang saling berbeda tetapi menentukan bagaimana warna/ ciri instansi tersebut. Di antara karateristik yang paling menonjol di antara badan/instansi pelaksana kebijakan dalam program dana BOS adalah pembagian kerja yang merata di antara pegawai, adanya formalitas yang tinggi dan jenjang karir para pegawai maka bahwa pengelolaan dana harus dipertanggungjawabkan, sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang sudah disepakati. Jadi untuk melaksanakan prinsip tersebut sekolah harus benar-benar melakukan perencanaan dalam pembagian staff program dana BOS dengan melibatkan seluruh warga sekolah agar tidak ada terjadinya perselisihan persepsi dana yang telah digunakan dalam program dana BOS.

4. *Demokratis*

Prinsip demokratis dalam program dana BOS SMK sesuai dengan teori kebijakan publik dalam faktor komunikasi antar organisasi dan aktivasi kebijakan yang diterapkan seperti dikomunikasikan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran tentang apa yang menjadi standar dan tujuan

konsistensi terhadap suatu standar tujuan kebijakan, maka apa yang menjadi standar dan tujuan tadi akan sulit untuk dicapai. Dengan kejelasan ini, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan darinya dan tau apa yang harus mereka lakukan merupakan penyusunan perencanaan dalam pengambilan keputusan pemecahan masalah yang telah ditempuh melalui jalan musyawarah dan mufakat untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga sekolah dan masyarakat memberikan saran kritik dan pendapatnya. SMK Negeri 5 Samarinda dalam pelaksanaan dana BOS SMK harus menerapkan tata cara tersebut seperti pembentukan tim untuk pengalokasian anggaran dalam dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS SMK yang melibatkan seluruh warga sekolah dalam pertanggungjawaban dalam suatu kegiatan serta adanya keterbukaan kepada wali murid dalam seluruh informasi dana BOS yang dilaksanakan sehingga orang tua siswa yang memberikan saran, kritik dan pendapat terkait pelaksanaan dana BOS SMK.

5. Efektif dan Efisien

Dalam pelaksanaan program dana BOS SMK, sekolah harus dapat memanfaatkan dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik dalam faktor sumber daya kebijakan dimana sumber daya merupakan aspek penting dalam menunjang implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumber daya niscaya tujuan yang ingin dicapai tidak dapat diwujudkan. Faktor sumber daya ini mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan bisa efektif karena jika pelaksanaan dikerjakan dengan baik dan benar maka dapat terjadi keseimbangan dana antara dana yang telah digunakan dengan dana yang telah diberikan. SMK Negeri 5 Samrinda dalam dalam prinsip tersebut wajib menerapkan matangnya perencanaan awal dalam penggunaan dana BOS sehingga mendapatkan jumlah anggaran dalam penggunaan dana BOS dengan petunjuk teknis BOS yang telah ditentukan karena telah sesuai dan harus ada ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan anggaran dana BOS.

6. Tertib Administrasi dan Pelaporan

Pada program dana BOS yang telah dilaksanakan oleh sekolah dalam prinsip tertib administrasi dan pelaporan yang sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik dalam faktor sikap pelaksana kebijakan dimana implementasi kebijakan dapat berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan tentu tidak lepas dari sikap pelaksana. Implementasi kebijakan akan berjalan apabila pelaksana mengetahui betul apa yang akan dilaksanakan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kemampuan yang dimiliki adalah merupakan kekuatan persepsi yang sesuai dengan ketentuan- ketentuan di antara petugas mengenai standar dan tujuan kebijakan yang bersangkutan.

Sekolah yang menerima dana harus menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan

yang dipersyaratkan. SMK Negeri 5 Samarinda yang merupakan salah satu sekolah penerima dana BOS SMK dalam prinsip tertib administrasi dan pelaporan harus melaporkan semua kegiatan secara tepat waktu dalam anggaran dana BOS. Selain itu salah satu staff yaitu staff keuangan wajib membuat Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RKAS) maupun rincian penggunaan BOS dengan membuat pembukuan baik secara administratif maupun pelaporan meliputi buku kas umum, buku kas pembantu bank, bukti pengeluaran dana BOS, laporan ringkas dan lain-lain.

7. *Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional (BOS) di SMK Negeri 5 Samarinda*

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat implementasi program dana BOS SMK Negeri 5 Samarinda adalah adanya ketidaktepatan waktu dalam pelaporan keuangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), perubahan perencanaan awal dalam penggunaan dana dalam program dana BOS untuk membeli barang sesuai dengan petunjuk teknis dalam pembelian barang seperti alat tulis kantor dan barang praktik, dan adanya terjadi perbedaan persepsi antara komite sekolah dan panitia khusus dalam program dana BOS.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dilapangan, penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi kendala di SMK Negeri 5 Samarinda dalam memberikan dana pada program dana BOS, adapun hal tersebut dapat dijelaskan sesuai dengan temuan-temuan yang didapati dilapangan seperti berikut ini :

Adapun implementasi prinsip program dana BOS di SMK Negeri 5 Samarinda sebagai berikut :

1. Swakelola dan Partisipatif

SMK Negeri 5 Samarinda dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK sudah dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Pihak sekolah juga telah melibatkan warga sekolah untuk aktif berpartisipasi dalam mendukung terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Transparan

Prinsip transparan dalam program pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Negeri 5 Samarinda belum berjalan dengan baik karena pelaksanaan sosialisasi program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada orang tua siswa hanya sebagian besarnya saja. Kebijakan pengelolaan program dan penggunaan dana belum diinformasikan secara keseluruhan.

3. Akuntabel

Prinsip akuntabel belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya keterlibatan antara seluruh staff guru dan warga sekolah, sekolah belum melakukan taksiran harga dengan cermat dan kurangnya sekolah dalam memaksimalkan peran komite sekolah.

4. Demokratis

Prinsip demokratis sudah berjalan dengan baik dalam pembentukan tim untuk pengalokasian anggaran dalam dana BOS tetapi ada kekurangan dalam pembentukan yaitu tidak semua staff guru diikutsertakan dalam pertanggungjawaban dalam suatu kegiatan dan tidak adanya keterbukaan kepada wali murid.

5. Efektif dan Efisien

Prinsip efektif dan efisien belum berjalan dengan baik dikarenakan belum matangnya perencanaan awal dalam penggunaan dana BOS sehingga terjadi perubahan jumlah anggaran dalam penggunaan dana BOS.

6. Tertib Administrasi dan Pelaporan

Prinsip tertib administrasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya keterlambatan pelaporan anggaran dana BOS tetapi untuk sistem laporan dalam penanggungjawaban dana BOS sudah dilaksanakan dengan baik.

Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program dana BOS SMK Negeri 5 Samarinda yaitu adanya ketidak tepatnya waktu dalam pelaporan keuangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), perubahan perencanaan awal dalam penggunaan dana dalam program dana BOS untuk membeli barang sesuai dengan petunjuk teknis dalam pembelian barang seperti alat tulis kantor dan barang praktik, dan adanya terjadi perbedaan persepsi antara komite sekolah dan panitia khusus dalam program dana BOS.

Saran

Diharapkan kepada Sekolah SMK Negeri 5 Samarinda agar tetap mempertahankan kebijakan dalam memberikan program dana BOS SMK sesuai dengan apa yang diinginkan murid-murid serta orang tua mengenai prinsip program BOS SMK di SMK Negeri 5 Samarinda. Untuk menunjang itu semua tentunya peran pemerintah juga sangat berdampak bagi kemajuan SMK Negeri 5 Samarinda dengan cara memberikan bantuan anggaran pendapatan Pemerintah Daerah untuk melancarkan pendidikan wajib belajar yang sesuai di SMK Negeri 5 Samarinda.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. CV Andi. Jakarta.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung. Permata Press.
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2009. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ihsan, Fuad. 2003. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. LP3ES : Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2001. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

- Mulyasa, E. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Prilaku Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nugroho, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta; Kanisius.
- Pasalong, Harbani , 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik..* Bandung. Alfabeta.
- Pabundu, Tika. 2005. *Metode Penelitian Geografis*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Reksopoetranto, Soemardi. 2002. *Manajemen Proyek Pembangunan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI : Jakarta.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Suharto, Edy. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama : Bandung.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : Grafindo persada.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta. Media Pressindo.
- Zainuddin, H. M. 2008. *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dokumen-Dokumen

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

Sumber Internet

- Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah SMK Tahun 2014
[http://www.ditpsmk.net/juknis/files/01-PS-2014%20Bantuan%20Operasional%20Sekolah%20\(BOS\)%20SMK.pdf](http://www.ditpsmk.net/juknis/files/01-PS-2014%20Bantuan%20Operasional%20Sekolah%20(BOS)%20SMK.pdf) (diakses 7 November 2014, jam 22:03)